

## Strategi Ketahanan Pangan Indonesia dalam Konstruksi Media (Analisis Framing Pada Berita Tirto.Id)

Indah Suryawati

Universitas Budi Luhur

Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12260

e-mail: [indahsuryawati\\_2121@yahoo.com](mailto:indahsuryawati_2121@yahoo.com)

### ABSTRACT

*The success of development in the agricultural sector of a country is reflected in the countries ability on self-sufficiency in food or at least food security. In Indonesia, food security is an important topic, not only seen from economic and social values, but it is also consists an enormous political consequences. Even in many countries, food security is often used as a political tool for an aspiring presidential candidate to gain the support of the people news coverage of food security is needed by the public and the media have an enormous role in disseminating information on community food security are widely and quickly. Media is one of the references of the public to obtain information formally in accordance with its function as social control. This research aims to analyze the communication strategy of sustainable food security sector in Indonesia of the framing theory. Methods used is framing Robert M. Entman, the object of his research several Tirto.id news that spread the food security. The result showed Tirto.id considers the problems that arise related to food security caused by the Indonesian Government itself: 1) changing the scheme of distributing food subsidies to the community in the form of money and 2) opening the tap for imports of rice and corn..Tirto.id leads the audience that strategies in the sector of food security in Indonesia is unclear.*

**Keywords:** news on food security, online media, framing, strategy

### ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian suatu negara tercermin dari kemampuan negara tersebut dalam swasembada pangan atau paling tidak ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai ekonomi dan sosial, tapi juga mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Bahkan di banyak negara, ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang (calon) presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Pemberitaan ketahanan pangan diperlukan oleh masyarakat dan media memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi ketahanan pangan pada masyarakat secara luas dan cepat. Media menjadi salah satu acuan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara resmi sesuai dengan fungsinya sebagai kontrol sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi dalam sektor ketahanan pangan di Indonesia melalui pemberitaan media dengan teori framing. Metode yang digunakan yaitu Framing Robert M. Entman, objek penelitiannya adalah beberapa berita ketahanan pangan di Tirto.id. Hasil penelitian menunjukkan Tirto.id menganggap masalah yang timbul terkait ketahanan pangan disebabkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, yaitu mengubah skema penyaluran subsidi pangan ke masyarakat dalam bentuk uang dan dibukanya keran impor beras serta jagung. Tirto.id menggiring khalayaknya bahwa strategi sektor ketahanan pangan di Indonesia tidak jelas.

**Kata kunci:** berita ketahanan pangan, media online, framing, strategi

### Latar Belakang

Persoalan pangan memang jadi isu yang selalu menggelinding setiap pemerintahan yang berkuasa. Persoalan impor, swasembada, hingga narasi ketahanan pangan seolah saling erat satu sama lain. Pada pilihan presiden

(Pilpres) 2019, isu ketahanan pangan juga menjadi barang dagangan masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden. Kubu Jokowi maupun Prabowo bersamaan mengangkat isu ketahanan pangan sebagai materi kampanye mereka, mulai persoalan

beras, rencana impor jagung, harga bahan pangan yang masih fluktuatif hingga infrastruktur pendukung swasembada pangan yang belum memadai.

Peneliti tertarik mengkaji tentang ketahanan pangan karena ini menjadi salah satu fokus negara-negara di dunia tak hanya Indonesia. Sebab masalah pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Selain itu, masalah pangan berkaitan dengan tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, produktivitas suatu negara berkaitan dengan kebutuhan pangan warganya yang tercukupi.

Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia bersumber dari Undang-Undang (UU) No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah *"kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan"*.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan,

Jurnal KOMUNIKATIF Vol. 8 No. 1 Juli 2019

namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). "Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal" (<http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>).

UU Pangan sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Sementara pada World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Pambudy, 2002).

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi

terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, sudah menyusun Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Ada sembilan Indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Selanjutnya, IKP dikelompokkan dalam enam kelompok, angka enam paling punya ketahanan pangan dan angka satu sebagai wilayah yang paling rentan pangan (<https://tirto.id/seberapa-kuat-ketahanan-pangan-indonesia-dhNr>, diunduh tanggal 26 maret 2019, pukul 11:04).

Berdasarkan skor Indeks Ketahanan Pangan, mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Kementerian Pertanian menyebutkan, ada 81 kabupaten (19,47 persen) dan 7 kota (7,14 persen) di Indonesia yang perlu mendapat prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif. Menurut Global Food

---

Security Index (GFSI), hasil kerja sama *The Economist* dan perusahaan sains bidang pangan Corteva, menyebutkan indeks ketahanan pangan global, menunjukkan ketahanan pangan Indonesia memang ada perbaikan setidaknya sejak 2012. Skor Indonesia di semua aspek pada 2012 sebesar 46,8 naik menjadi 54,8 pada 2018 (skor tertinggi 100). Tahun lalu, Indonesia menempati posisi 65 di dunia dan kelima di ASEAN dari 113 negara (Oktober 2018) (<https://tirto.id/seberapa-kuat-ketahanan-pangan-indonesia-dhNr>, diunduh tanggal 26 April 2019, pukul 04:31 WIB).

Media adalah tempat di mana khalayak memperoleh informasi mengenai realitas politik dan sosial yang terjadi di sekitar mereka (Eriyanto, 2012). Oleh karena itu, penafsiran individu atas sebuah peristiwa dipengaruhi oleh bagaimana media membingkai peristiwa tersebut. Pemahaman individu atas realitas politik dan sosial terbentuk dari apa yang disajikan oleh media.

Menurut McComb dan Shaw (dikutip dari McQuail dan Windahl), khalayak tidak hanya mempelajari berita dan hal-hal lain melalui media, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa

memberikan penekanan terhadap topik tertentu. Di sini media berperan bagaimana sebuah realitas didefinisikan oleh media dengan cara-cara tertentu seperti lewat kata, kalimat ataupun gambar.

Pemberitaan tentang ketahanan pangan sangat diperlukan oleh masyarakat dan media *online* memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi tersebut secara luas dan cepat. Karena media menjadi salah satu acuan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi resmi sesuai dengan fungsi yang melekat padanya yaitu fungsi memberi informasi, mendidik, hiburan hingga fungsi kontrol sosial.

Salah satu situs berita di Indonesia yang intens memberitakan tentang ketahanan pangan Indonesia setiap bulannya dari tahun ke tahun adalah Tirto.id. Ini menunjukkan bahwa setiap media memiliki kepentingannya masing-masing dalam memilih suatu peristiwa yang akan mereka beritakan. Media akan memutuskan seberapa dalam mereka akan memberitakan suatu peristiwa; apakah hanya akan memberitakan peristiwa tertentu demi kepentingan aktualitas semata, atau memberitakan secara mendalam dan terus menerus demi kepentingan ideologinya, atau bahkan ada kepentingan ekonomi hingga politik

yang menjadi tujuan diproduksinya berita tersebut. Alasan lain pemilihan situs berita Tirto.id adalah karena situs ini tergolong baru dan mengusung *genre jurnalisme online* dengan dilengkapi grafis. Tirto.id seringkali pula mengangkat suatu peristiwa/isu dengan menggunakan *depth reporting*.

Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak dapat dilakukan melalui *framing*. Di mana peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas (Eriyanto, 2011). Dalam pandangan konstruksionis, berita diibaratkan seperti sebuah drama dimana terjadi pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan sebuah peristiwa. Sebagaimana sebuah drama, tentu saja ada pihak yang didefinisikan sebagai pahlawan, tetapi ada juga pihak yang didefinisikan sebagai musuh dan pecundang (Eriyanto, 2012).

Karena itu, pemilihan *headline*, tema, kalimat, dan kata dalam sebuah berita yang disajikan media tersebut kepada khalayak sepenuhnya tidak bebas nilai. Kebijakan resmi redaksi terhadap suatu peristiwa bukan hanya

tertuang dalam editorial atau tajuk rencana, tetapi juga pada pemilihan *headline* untuk menentukan arah berita. Di mana pemilihan kosa kata dalam *headline* misalnya, bisa saja merepresentasikan bagaimana wartawan mengkonstruksi realitas dalam sebuah berita. Tentunya dengan cara dan sudut pandang yang berbeda, tentang siapa dan *angle* apa yang ingin ditonjolkan dan dianggap penting oleh media itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pembingkai (framing) strategi ketahanan pangan Indonesia dalam berita Tirto.id periode Januari hingga Februari 2019.

## **Tinjauan Pustaka**

### **a. Media Online**

Kehadiran media berbasis internet (media *online*) melahirkan fenomena tersendiri bagi masyarakat, di mana mereka lebih gemar melakukan pencarian informasi melalui media *online* dibandingkan media konvensional seperti media cetak dan media penyiaran. Ini karena media *online* memiliki kelebihan dalam menyajikan informasi, antara lain lebih cepat dan lebih *real time* dibanding media konvensional.

Ini diperkuat oleh hasil riset yang dilakukan oleh *Microsoft*, yang

menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia memilih memperoleh berita *online* terbaru melalui media sosial ketimbang media konvensional seperti surat kabar dan televisi (<http://lifolitan.com/hasil-survey-orang-Indonesia-lebih-memilih-media-online-dibanding-media-cetak>, diakses tanggal 19 April 2017 pukul 10.40 WIB). Oleh karena itu, media *online* kini menjadi bagian dari ruang lingkup pers, karena medium ini mampu menyajikan berita secara cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayaknya

Media *online* dapat disamakan dengan pemanfaatan media dengan menggunakan perangkat internet. Keunggulan media *online* adalah informasi bersifat *Up to date*, *real time*, dan praktis. *Up to date* karena media *online* dapat melakukan *upgrade* suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media *online* memiliki proses penyajian informasi dan berita yang lebih mudah dan sederhana. *Real time* karena media *online* dapat langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa berlangsung. Sebagian besar wartawan media *online* dapat mengirim informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa, setiap saat dan setiap waktu untuk meng-*upgrade* informasi. Praktis karena media *online* dapat diakses dimana dan kapan saja, sejauh didukung

oleh fasilitas teknologi Internet. Media *online* kini menjadi alternatif media yang paling mudah dalam mendapat akses informasi atau berita. Teknologi internet menjadi basis terpenting dalam pemanfaatan media *online* (Yunus, 2012).

Sebagai acuan teoritis berkaitan dengan peran media, mengutip penjelasan Joseph R. Dominic bahwa setidaknya ada 5 fungsi media :

- **Pengawasan** (*Surveillance*). *Surveillance* mengacu kepada yang kita kenal sebagai peranan berita dan informasi dari media massa. Fungsi pengawasan ini dibagi dua, yaitu pengawasan peringatan (media menyampaikan informasi kepada kita mengenai ancaman topan, letusan gunung api, kondisi ekonomi yang mengalami depresi, meningkatnya inflasi, atau serangan militer), dan pengawasan instrumental (berkaitan dengan penyebaran informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari).
- **Interpretasi** (*Interpretation*). Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa. Contoh paling nyata dari fungsi interpretasi adalah tajuk rencana surat kabar dan komentar radio atau televisi siaran.
- **Hubungan** (*Linkage*). Media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran perseorangan. Fungsi hubungan yang dimiliki media itu sedemikian berpengaruhnya kepada masyarakat sehingga dijuluki "*public making*" ability of the mass media atau kemampuan membuat sesuatu menjadi umum dari media massa.
- **Sosialisasi**. Bagi Dominick, sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai (*transmission of values*) yang mengacu kepada cara-cara di mana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok.
- **Hiburan** (*Entertainment*). Bagi Dominick, hiburan merupakan fungsi media massa. Mengenai hal ini memang jelas tampak pada televisi, film, dan rekaman suara (Effendy Uchjana, 2013).

## b. Jurnalisme Online

*Jurnalisme online* mempunyai kekhasan dari sisi gaya penulisan dibanding *jurnalisme konvensional*. Robert Niles dalam bukunya berjudul, *How To Write For The Web: The Online Journalism Review*, menjelaskan bahwa gaya penulisan oleh jurnalis *online* adalah *short* (ringkas) - *the shorter the better*; *active voice* (- menggunakan kalimat aktif); *strong verbs* (menggunakan kata kerja yang kuat); *contextual hyperlinking* (melengkapi informasi dengan tautan yang terkait sehingga memungkinkan pembaca memperkaya pengetahuan dan informasi pendukung); *use formatting* (menggunakan variasi tampilan huruf atau kalimat) misalnya dengan menggunakan daftar (*list*), *header* tebal, dan kutipan (*blockquotes*); dan *easy to read* (mudah dibaca) (Fernando Lumowa, *Media Online: Teknik Dasar Penulisan Berita, Artikel dan Bahasa Jurnalistik*, [sulut.kemenag.go.id/file/file/humas/zuvw1339679719.ppsx](http://sulut.kemenag.go.id/file/file/humas/zuvw1339679719.ppsx) diakses pada 04 Mei 2017 pkl 09:04 WIB).

Beberapa karakteristik *jurnalisme online*, antara lain:

- *Unlimited Space*, Jurnalistik *online* memungkinkan halaman tak terbatas. Ruang bukan masalah. Artikel dan berita bisa sepanjang

dan selengkap mungkin, tanpa batas.

- *Audience Control*, Jurnalistik *online* memungkinkan pembaca lebih leluasa memilih berita/informasi.
- *Non-Lienarity*, Dalam jurnalistik *online* masing-masing berdiri sendiri, sehingga pembaca tidak harus membaca secara berurutan.
- *Storage and Retrieval*, Jurnalistik *online* memungkinkan berita “abadi”, tersimpan, dan bisa diakses kembali dengan mudah kapan dan di mana saja.
- *Immediacy*, Jurnalistik *online* menjadikan informasi bisa disampingkan secara sangat cepat dan langsung (Iskandar, dan Rini Lestari, 2016).

Sajian informasi media *online* tidak dibatasi ruang (halaman) seperti surat kabar dan tidak dibatasi waktu (durasi) seperti dialami radio dan televisi. Media online bisa memuat semua komponen teks (transkrip), video, audio, juga foto dan semua tampil berbarengan. Audiens media online bisa memperoleh semua informasi tanpa merasa tersika harus berkonsentrasi. Mereka bahkan bisa mengomentari subyek berita semuanya. Pembaca bisa ikut mengoreksi, memuji, dan mengecam wartawan pembuat

berita, para kolumnis, dan sesama pengakses berita online (Romli, 2014)

### c. Konstruksi Realitas Media

Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan makna) tertentu (Hamad, 2014). Dengan demikian bahasa adalah bagian penting dalam media massa. Hanya melalui bahasa para pekerja media menghadirkan reportasenya kepada khalayak. Setiap hari, para pekerja media memanfaatkan bahasa dalam menyajikan berbagai realitas (peristiwa, keadaan, benda) kepada publik. Dengan bahasa mereka menentukan gambaran beragam realitas ke dalam benak masyarakat.

Adapun sebuah konstruksi realitas mempunyai prinsip setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi)

sebuah peristiwa, keadaan, atau benda adalah usaha mengonstruksikan realitas. Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa.

Aspek konstruksi berhubungan dengan bagaimana wartawan/media menampilkan peristiwa tersebut sehingga relevan bagi khalayak dan ditempatkan dalam konteks sosial tertentu dimana khalayak tersebut berada (Eriyanto, 2012). Media di sini berupaya untuk menjaga nilai-nilai kelompok, dan melakukan kontrol agar nilai-nilai kelompok itu dijalankan, sehingga membentuk kenyataan apa yang layak, apa yang baik, apa yang sesuai, dan apa yang dipandang menyimpang.

Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul, *Konstruksi Sosial Media Massa* mengatakan bahwa konstruksi sosial media massa atas realitas sosial terjadi dalam dua kategori proses. Pertama, kategorisasi membangun konstruksi sosial, dan kedua, kategorisasi membangun citra media. Frans M. Parera (1990: xx) juga menuturkan bahwa terciptanya konstruksi sosial itu melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi,



obyektivasi, dan internalisasi (Bungin, 2011).

Ada enam prinsip dasar konstruksi realitas oleh media massa yang dikutip dari *National Association for Media Literacy Education's* (2007), yakni:

- Semua pesan media “dibangun”.
- Setiap media memiliki karakteristik, kekuatan, dan keunikan “membangun bahasa” yang berbeda.
- Pesan media diproduksi untuk satu tujuan.
- Semua pesan media berisi penanaman nilai dan tujuan yang ingin dicapai.
- Manusia menggunakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman mereka untuk membangun sendiri arti pesan media.
- Media dan pesan media dapat mempengaruhi keyakinan, sikap, nilai, perilaku, dan proses demokrasi (Tamburaka, 2012).

#### d. Framing Robert M. Entman

*Framing* adalah cara untuk memberikan penafsiran keseluruhan untuk mengisolasi fakta-fakta. Hampir tidak dapat dihindari oleh jurnalis untuk melakukan ini dan dengan demikian memisahkan dari ‘objektivitas’ yang

murni dan memperkenalkan beberapa bias (yang tidak disengaja). Ketika informasi dipasok kepada media berita oleh para sumber (sering kali), maka informasi ini kemudia muncul dengan kerangka yang terbentuk yang sesuai dengan tujuan sumber dan tidak dapat murni objektif (McQuail, 2014). Secara singkatnya, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2012).

Robert M. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isu media. Konsep *framing*, oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek.

Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan

mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok (menempatkan di-*headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2012).

**Tabel 1** Dimensi Besar dalam Pembingkai

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan ( <i>included</i> ), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan ( <i>excluded</i> ). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Sumber: Eriyanto, 2012.

Selain itu, konsep *framing* Entman menggambarkan secara luas bagaimana sebuah peristiwa dimaknai atau ditandakan oleh wartawan. Entman membagi perangkat *framing* ke dalam empat elemen yaitu:

- **Define Problem (pendefinisian masalah)**, elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama bisa dipahami dengan cara dan bingkai yang berbeda.
- **Diagnose Causes (memperkirakan penyebab masalah)**, merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa saja yang dianggap aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa *what* (apa) atau *who* (siapa).
- **Make Moral Judgement (membuat keputusan moral)** adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat.
- **Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian masalah)**, elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana

peristiwa itu dilihat dan siapa saja yang dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2012).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data-data deskriptif melalui kata-kata maupun kalimat. Penelitian kualitatif menekankan realitas yang dibangun secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dengan yang dipelajari membentuk penyelidikan (Salim, 2001). Menurut Rachmat Kriyantono, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan menjelaskan fenomena-fenomena yang sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang selengkap-lengkapnyanya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi *sampling* (2006).

Sedang paradigma pada penelitian ini adalah konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi (Eriyanto, 2012). Sejatinya setiap paradigma memiliki pandangannya tersendiri terhadap suatu realitas. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Servaes (1993) mengatakan bahwa paradigma adalah

*frame of meaning*, yang berarti sudut pandang atau kerangka makna terhadap suatu realitas (Mulyana dan Solatun, 2008). Sedangkan menurut Wimmer dan Dominick, pendekatan dengan paradigma yaitu seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia (Kriyantono, 2006).

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis *framing* dengan model yang ditawarkan oleh Robert M. Entman. Analisis *framing* merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penonjolan aspek. Dalam konsep Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Sementara itu, objek analisis dalam penelitian ini adalah berita Tirto.id tentang ketahanan pangan yang diproduksi dari periode Januari hingga Februari 2019 yang berjumlah enam berita yaitu :

**Tabel 2** Objek Penelitian

No.	Judul Berita	Media	Waktu Terbit
1.	Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah	Tirto.id	9 Januari 2019

	Tak Serius Urus Pangan		
2.	Masalah Logistik Disebut Masih Jadi Tantangan Ketahanan Pangan RI	Tirto.id	14 Februari 2019
3.	Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?	Tirto.id	15 Februari 2019
4.	Seberapa Kuat Ketahanan Pangan Indonesia?	Tirto.id	26 Februari 2019
5.	Rastra Akan Jadi Bantuan Non Tunai, Beras Bulog Terancam Rusak Pekerja	Tirto.id	27 Februari 2019
6.	Momok di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera	Tirto.id	28 Februari 2019

Sumber : data penelitian, 2019

## Pembahasan

### a. Framing Robert M. Entman dalam dua dimensi besar

#### • Seleksi Isu

Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*). Tidak semua aspek atau bagian dari isu yang ditampilkan, wartawan memilih

aspek tertentu dari suatu isu (Eriyanto, 2012).

Ada dua isu yang sengaja dimasukkan oleh Tirto.id. *Pertama*, isu tentang rencana pemerintah yang hendak mengubah skema penyaluran subsidi pangan dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai April 2019. Rencana pemerintah melakukan perubahan di Program BPNT ini dianggap sebagai momok yang menakutkan oleh Bulog. Bagaimana tidak, sekitar 15,5 juta kelompok penerima manfaat yang memiliki kartu keluarga sejahtera tak lagi menerima subsidi tunai dalam bentuk beras dan pangan lainnya, melainkan menerima subsidi dalam bentuk transfer uang. Sementara stok beras masih mengalami penumpukan di gudang Bulog dan belum seluruhnya berhasil didistribusikan secara baik. Tak sampai di situ saja, Program BPNT dapat mengakibatkan penyaluran beras Bulog untuk program Rastra yang biasanya mencapai 2,5-3,4 juta ton pertahun bakal terhenti. Namun sisi lain, pemerintah masih menugaskan Bulog untuk menyerap beras petani sebanyak 1,8 juta ton di tahun 2019. Dan Bulog harus membeli beras/gabah dari petani dengan harga tinggi.

*Kedua*, isu tentang rencana pemerintah yang hendak membuka kebijakan impor beras dan jagung

dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri dan menstabilkan harga. Anehnya, pemerintah beranggapan impor beras dan jagung tidak bertentangan dengan program swasembada pangan atau kemandirian pangan, tapi kebijakan impor disebutkan malah untuk mengejar ketahanan pangan.

Terkait pemberitaan ketahanan pangan Indonesia, ada hal menarik yang dilakukan oleh Tirto.id. Situs berita ini menurunkan berita dengan judul yang tidak biasa, yaitu *‘Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?’*. Oleh Tirto.id, judul berita dibuat dalam bentuk pertanyaan. Hal yang jarang dilakukan oleh media berita lainnya, karena cara penulisan judul seperti itu tidak lazim. Itu artinya, Tirto.id sendiri hendak mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dan Tirto.id dalam berita ini menggunakan kutipan beberapa narasumber dari dua sisi, yaitu sisi pro dan sisi kontra terhadap kebijakan impor beras/jagung yang dianggap tidak bertentangan dengan swasembada pangan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah.

Dari sisi pro, Tirto.id menggunakan pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy yang membenarkan kebijakan impor beras pemerintahan Joko Widodo. Alasannya,

itu memang perlu dilakukan demi mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus menstabilkan harga. Rommy bukan cuma merasionalisasi kebijakan ini, tapi juga mengaitkannya dengan visi Jokowi untuk mencapai swasembada pangan, meski belum juga tercapai hingga tahun ke-5 pemerintahannya.

*“Sebenarnya yang dimaksud swasembada pangan itu bukan berarti tidak boleh impor,” kata Rommy, seperti dikutip dalam situs ppp.or.id. “Impor, di mana pun, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan gejolak harga agar tidak berimbas kepada tergerusnya daya beli masyarakat,” katanya. (paragraph 2 pada berita berjudul, Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?)*

Sementara dari sisi kontra, Tirto.id mengutip pernyataan peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Rusli Abdullah, yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa impor beras tidak bertentangan dengan program swasembada pangan.

*Dia bilang impor masih tetap dapat dibuka saat swasembada dicapai. Dengan catatan: hanya pada komoditas yang tidak dapat diproduksi di Indonesia. Misalnya beras khusus dengan kalori rendah. “Tapi misal kita sudah bisa produksi beras kualitas biasa tapi masih impor dari negara lain, berarti itu bukan swasembada,” ucap Rusli (paragraph 4 pada berita*

berjudul, *Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?*).

Tirto.id pun mengutip :  
*Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra dalam Kebijakan Pembangunan Agribisnis Padi (2004) menyebut ketahanan pangan yang diartikan semata sebagai stabilitas harga saja itu rapuh. Buktinya, swasembada Orde Baru yang dibanggakan itu, hanya bertahan lima tahun. Maka perlu ada upaya untuk benar-benar memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri (paragraph 6 pada berita berjudul, Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?).*

Lebih lanjut tentang pemberitaan swasembada pangan, Tirto.id tampaknya melakukan strategi untuk memperkuat *frame* yang dibuatnya dengan memproduksi satu artikel tersendiri berjudul, *“Swasembada Beras ala Soeharto: Rapuh dan Cuma Fatamorgana”*. Dalam artikel tersebut, Tirto.id mengulas panjang lebar tentang keberhasilan swasembada pangan di era pemerintahan Soeharto. Bahkan ada kalimat yang dikutip oleh Tirto.id.

*“Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan,” kata Presiden RI ke-2 ini seperti dikutip dari buku Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto (2006) karya Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Adi Sage (hlm. 92).*

Kalimat ini digunakan lagi oleh Tirto.id dalam berita lainnya yang berjudul, *“Seberapa Kuat Ketahanan Pangan Indonesia?”*. Tirto.id seolah-olah hendak mempertegas bahwa Indonesia pernah merasakan swasembada pangan pada masa pemerintahan Soeharto. Bahkan dalam Konferensi ke-23 *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang dihelat di Roma, Italia, pada 14 November 1985 silam, Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di forum tersebut terkait keberhasilannya melakukan swasembada pangan. Di balik keberhasilan swasembada pangan, pemerintahan Soeharto tetap melakukan impor beras. Artinya, impor beras bukanlah sesuatu yang tak boleh dilakukan, meski kondisi suatu negara dalam keadaan swasembada pangan.

Padahal ketika itu, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton, sementara konsumsi di dalam negeri hanya 25 juta ton. Indonesia bahkan bisa menyumbang 100 ribu ton padi untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Afrika. Pada tahun itu Indonesia toh masih impor, jumlahnya 414 ribu ton. Tujuannya agar menjaga stabilitas ketahanan pangan. Angka impor terus bertambah sejak masuk dekade 1990an. Pada 1995,

ketergantungan terhadap impor beras melambung hingga mencapai angka 3 juta ton. Sementara pada 1999, ketika masih masa krisis, impor beras nyaris menembus 5 juta ton (<https://tirto.id/apakah-saat-swasembada-tak-boleh-impor-pangan-dg61>).

Dalam seleksi isu, Tirto.id “mengeluarkan” fakta bahwa isu ketahanan pangan Indonesia sebagai isu politik. Situs Tirto.id memasukkan isu ketahanan pangan Indonesia semata-mata hanya sebagai isu ekonomi. Padahal rencana program BPNT yang mulai diberlakukan April 2019 bisa dikaitkan dengan aspek politik lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu calon presiden untuk kedua kalinya periode 2019–2024.

Apalagi isu ketahanan pangan menjadi bagian penting dari kampanye Jokowi pada pemilihan presiden 2019 kemarin. Di mana rencana perubahan skema penyaluran subsidi di Program BPNT dalam bentuk transferan uang dapat mendulang suara pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin. Karena bisa dipastikan bahwa pemberian subsidi berupa uang untuk menggantikan subsidi beras dan pangan lainnya lebih mudah menarik hati dan simpati masyarakat pra sejahtera yang menjadi sasaran dari Program BPNT pada sosok capres Jokowi-Ma'ruf Amin. Dan besar

kemungkinan masyarakat pra sejahtera akan memilih Jokowi sebagai presiden untuk kedua kalinya.

#### • **Penonjolan Aspek**

Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2012).

Adapun dua hal terkait penonjolan aspek yang ditemukan dalam pemberitaan ketahanan pangan Indonesia di Tirto.id. *Pertama*, diksi yang digunakan dalam berita lebih condong dibingkai dalam makna yang berkonotasi negatif. Dari enam berita yang menjadi objek analisis, sebagian besar *headlinenya* menggunakan kata atau kalimat yang berkonotasi negatif. Seperti : “**Momok** di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera”; “Rastra Akan Jadi Bantuan Non Tunai, Beras Bulog **Terancam Rusak** Pekerja”; “Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah **Tak Serius** Urus Pangan”; Apakah Saat Swasembada **Tak Boleh** Impor Pangan?; **Seberapa Kuat** Ketahanan Pangan Indonesia?

Peneliti juga menemukan bahwa Tirto.id juga menggunakan kata maupun kalimat yang berkonotasi

negatif dalam penulisan isi berita tentang ketahanan pangan Indonesia.

Contoh :

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Muhammad Khudori menilai bahwa transformasi Rastra menjadi BPNT di tahun 2019 bakal membuat Bulog **kewalahan** (Paragraf 4 pada berita berjudul Momok di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera)

"Jadi operasi pasar itu seperti **menggarami air laut**. Itu membuat **skema ini tidak adil**, karena harusnya ketika subsidi pangan atau proteksi harga, operasi pasar itu tidak ada lagi," imbuhnya (Paragraf 6 dalam berita berjudul, Momok di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera).

Anton mengkhawatirkan bila pemerintah tetap melanjutkan rencana itu, maka langkah tersebut akan **memukul petani lokal**. Apalagi rencana impor jagung yang dilakukan Kemendag nanti berdekatan dengan masa panen raya yang siklusnya antara Oktober hingga Maret. Kehadiran jagung impor, kata Anton, akan semakin **menyulitkan petani** menjual hasil panennya. Ia menilai kondisi ini menunjukkan **pemerintah tidak serius** soal urusan pangan (Paragraf 4 pada berita berjudul Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah Tak Serius Urus Pangan).

"Kami bingung alasan impor jagung sekarang yang dekat dengan masa panen. Ini, kan, **blunder**. Kalau seperti ini **presiden ingkar janji** dong. [Kebijakannya] malah **menyakiti**

**petani**," kata Anton (Paragraf 5 pada berita berjudul Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah Tak Serius Urus Pangan).

Impor Jalan Terus Ketika Swasembada Indonesia pernah swasembada beras ketika dipimpin oleh Suharto, meski sebetulnya **rapuh** dan hanya **fatamorgana**. Itu terjadi pada 1984 dan diakui oleh badan PBB Food and Agriculture Organization (FAO) (Paragraf 3 dalam berita berjudul, Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?)

Kedua, berita tentang ketahanan pangan Indonesia yang disajikan oleh Tirto.id cenderung diperkuat dengan data berupa angka-angka dari narasumber yang relevan di bidang ekonomi. Bahkan ada beberapa berita yang dilengkapi grafis dan diagram sebagai penguat data yang disajikan sebelumnya. Dengan kata lain, aspek yang hendak ditonjolkan oleh Tirto.id bahwa isu ketahanan pangan Indonesia adalah semata-mata aspek ekonomi karena sebagian besar isi berita yang menjadi objek analisis ditulis dengan memasukkan angka-angka.

Tirto.id tidak menyajikan berita ketahanan pangan Indonesia dari sisi aspek politik. Padahal isu ketahanan pangan terkait penyaluran subsidi kepada masyarakat pra sejahtera hingga isu impor beras/jagung bisa dipertajam dari sisi aspek politik. Misalnya dengan



menggunakan narasumber yang relevan di bidang ekonomi politik.

Anehnya, ada satu berita di Tirto.id yang menggunakan narasumber politik yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy untuk menampilkan sisi pro terhadap kebijakan impor beras/jagung yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal sebelumnya narasumber ini lebih banyak tampil di media terkait masalah politik dalam negeri, bukan terkait masalah ekonomi. Alasan dipilihnya Muhammad Romahurmuziy, karena ia adalah pemimpin partai yang berkoalisi dengan partai yang mengusung Jokowi.

*Impor, di mana pun, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan gejolak harga agar tidak berimbas kepada tergerusnya daya beli masyarakat," kata Romahurmuziy (Paragraf 2 pada berita berjudul Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?).*

*Apa yang dikatakan Rommy benar belaka: bahwa impor masih tetap ada meski misalnya sudah swasembada. Tapi tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan yang kurang seperti alasan-alasan impor saat ini, tapi agar harganya tetap stabil (Tirto.id pada berita berjudul Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?).*

Sebaliknya, Tirto.id dalam beritanya berjudul *Momok di Balik*  
Jurnal KOMUNIKATIF Vol. 8 No. 1 Juli 2019

*Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera* mengutip pernyataan Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Muhammad Khudori, yang mengandung muatan politik. Padahal narasumber berlatar belakang ekonomi.

*Meski demikian, menurut Khudori, kondisi ini tak akan banyak berubah hingga musim Pilpres berakhir. Sebab, kemudahan pencairan bantuan pangan yang disertai penambahan anggaran adalah salah satu cara untuk memanjakan masyarakat demi kepentingan elektoral. "Sepertinya tidak ada keputusan yang drastis sebelum 16 April. Dan Bulog sepertinya tunggu dulu lah sampai hasil Pilpres ketahuan," pungkasnya (Paragraf terakhir dalam berita berjudul, Momok di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera).*

## **b. Framing Robert M. Entman dalam empat elemen**

### **• Define Problems**

Tirto.id mendefinisikan isu ketahanan pangan dari aspek ekonomi semata, dengan menyebut jumlah produksi beras dan jagung, jumlah stok beras Bulog, jumlah impor jagung, fluktuasi harga bahan pangan dalam negeri hingga persentase tingkat ketahanan pangan. Aspek ekonomi ini diperkuat Tirto.id dengan penggunaan data berupa angka-angka.

*Pada laporan GFSI, ada empat aspek dalam penilaian indeks ketahanan pangan, yaitu*

keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, juga sumber daya. Bila ditelisik, skor aspek keterjangkauan pangan Indonesia adalah sebesar 55,2 (peringkat 63 dari 113 negara). Skor aspek ketersediaan adalah 58,2; menempati posisi ke-58. Sementara skor aspek kualitas dan keamanan sebesar 44,5 (peringkat 84) dan skor faktor sumber daya alam adalah 43,9 (peringkat 111). (Paragraf 9 pada berita berjudul *Seberapa Kuat Ketahanan Pangan Indonesia?*).

Bulog masih menyisakan stok sebanyak 2,2 juta ton beras yang belum terserap di tahun 2018. Angka ini cukup fantastis sebab selama satu dekade terakhir, stok beras akhir tahun yang berada di gudang Bulog berada di kisaran 1,3 juta sampai 1,5 juta ton. Stok akhir yang jumlahnya sangat besar itu membawa konsekuensi cukup serius. Sebab, beras merupakan komoditas yang sifatnya mudah rusak. Jika tak ada penyaluran yang jelas, lantas akan dikemanakan beras-beras tersebut? Sementara saat ini hingga dua bulan mendatang Bulog harus menyerap beras dari petani (Paragraf 4 pada berita berjudul *Momok di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera*).

Rilis Kementerian Pertanian pada 2018 menunjukkan adanya tren kenaikan, baik produksi maupun konsumsi jagung hingga 2021 mendatang. Surplus jagung pun dipastikan tetap terjadi hingga tahun 2021. Pada 2019, produksi jagung diperkirakan mencapai 29,9 juta ton dan konsumsi 21,6 juta ton. Jumlah ini diprediksi naik dibanding tahun 2018 dengan jumlah produksi 28,6 juta ton dan konsumsi 20,3 juta ton. Keduanya memiliki neraca jagung surplus sebanyak 6,7 juta ton. "Kalau jagung bisa disuplai dari dalam negeri, kenapa harus impor?" kata

Anton mempertanyakan keputusan pemerintah. (Paragraf 4 pada berita berjudul *Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah Tak Serius Urus Pangan*).

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengatakan tidak heran bila keputusan impor bertentangan dengan klaim data Kementan yang selalu menyebut jagung surplus. Dwi mencontohkan, pada November 2018, keputusan impor 100 ribu ton jagung malah menyebabkan kenaikan harga jagung di atas Rp6000/kg. Ia memprediksi kesalahan yang sama juga akan terjadi saat pemerintah menambah 30 ribu ton pada tahun ini. (Paragraf 7 pada berita berjudul *Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah Tak Serius Urus Pangan*).

Tirto.id juga memperkuat *frame* ini dengan mengutip pernyataan narasumber yang relevan di bidang ekonomi, seperti dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Dewan Ketahanan Pangan, dosen hingga peneliti. Hanya satu narasumber berlatar belakang politik yang dikutip oleh Tirto.id yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy.

#### • *Diagnose Causes*

Tirto.id menganggap masalah yang timbul terkait ketahanan pangan disebabkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri yaitu dalam hal ini adalah pemerintahan Jokowi. Ada beberapa hal yang menjadi titik permasalahan yaitu :

Pertama, rencana pemerintah yang hendak mengubah skema penyaluran subsidi pangan ke masyarakat pra sejahtera mulai April 2019, dari yang semula dalam bentuk subsidi beras dan bahan pangan lainnya menjadi subsidi dalam bentuk transferan uang.

*Sebab, sekitar 15,5 juta kelompok penerima manfaat yang memiliki kartu keluarga sejahtera tak lagi menerima subsidi dalam bentuk beras, melainkan transfer uang (Paragraf 3 dalam berita berjudul, Momok di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera).*

*Pemerintah lupa bahwa penyaluran subsidi pangan berupa beras sesungguhnya ada nilai strategis yang melekat pada jenis bahan pangan satu ini. Di mana beras adalah makanan pokok paling penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (baik dalam hal penyerapan tenaga kerja hingga pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), dalam bidang lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan dalam bidang sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.*

*Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah harusnya selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi pemerintah Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas*

*dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, tentunya pemerintah Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.*

Kedua, rencana pemerintah yang hendak membuka kembali kran impor beras serta impor jagung dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri dan menstabilkan harga. Padahal, kebijakan impor beras dan impor jagung justru dinilai sejumlah kalangan sebagai kebijakan yang menyakiti hati petani (Tirto.id menulisnya: “memukul petani lokal”, “menyulitkan petani”, “menyakiti petani”). Terutama petani jagung yang pada saat bersamaan akan melakukan panen raya yang siklusnya berkisar antara Oktober 2018 hingga Maret 2019.

*Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton **jagung impor** hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah **impor jagung** untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang (Paragraf 1 pada berita berjudul, Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah Tak Serius Urus Pangan’’).*

*Anton mengkhawatirkan bila pemerintah tetap melanjutkan*

rencana itu, maka langkah tersebut akan **memukul petani lokal**. Apalagi rencana impor jagung yang dilakukan Kemendag nanti berdekatan dengan masa panen raya yang siklusnya antara Oktober hingga Maret. Kehadiran jagung impor, kata Anton, akan semakin **menyulitkan petani** menjual hasil panennya. Ia menilai kondisi ini menunjukkan **pemerintah tidak serius** soal urusan pangan. Padahal pada 2014 silam, kata dia, Presiden Jokowi pernah berjanji stop impor. (Paragraf 5 pada berita berjudul, *Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah Tak Serius Urus Pangan*”).

Pertanyaannya, ketika stok jagung dalam negeri berlimpah, mengapa pemerintah melakukan impor jagung dari negara maju. Dan jika kebijakan impor jagung tetap diberlakukan oleh pemerintah, maka hal ini menyebabkan harga jagung di pasaran bakal anjlok dan petani pun akan merugi. Petani tak akan merasakan manisnya hasil panen mereka yang berlimpah.

Teringat dengan pernyataan Bustanul Arifin, Menteri Pertanian di era Soeharto bahwa pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju) akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh (Arifin, 2004).

Pertanyaan apakah pemerintah tak menyadari hal tersebut atau seolah-olah tutup mata demi kepentingan politik luar negeri? Bagaimana dengan kepentingan masyarakat, terutama petani yang juga butuh kehidupan lebih baik dari hasil usaha pertaniannya? Tak heran jika Tirto.id sempat “menyentil” pemerintah dengan mengutip pernyataan keras dari Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi

“Kami **bingung alasan impor jagung sekarang** yang dekat dengan masa panen. Ini, kan, **blunder**. Kalau seperti ini **presiden ingkar janji** dong. [Kebijakannya] **malah menyakiti petani**,” kata Anton (Paragraf 5 pada berita berjudul *Impor Jagung 30 Ribu Ton Bukti Pemerintah Tak Serius Urus Pangan*).

Ketiga, pemerintah melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), di satu sisi menyebabkan Bulog kehilangan pangsa pasar cukup besar. Berdasarkan data yang diberikan Tirto.id, stok beras akhir tahun 2018 yang berada di gudang Bulog berada di kisaran 1,3 juta sampai 1,5 juta ton. Stok akhir yang jumlahnya sangat besar itu membawa konsekuensi cukup serius. Sebab, beras merupakan komoditas yang sifatnya mudah rusak.

Apalagi, lanjut Khudori, Bulog masih menyisakan stok sebanyak 2,2 juta ton beras yang belum terserap di tahun 2018. Angka ini cukup fantastis sebab selama satu dekade terakhir, stok

beras akhir tahun yang berada di gudang Bulog berada di kisaran 1,3 juta sampai 1,5 juta ton. Stok akhir yang jumlahnya sangat besar itu membawa konsekuensi cukup serius. Sebab, beras merupakan komoditas yang **sifatnya mudah rusak**. Jika tak ada penyaluran yang jelas, lantas akan dikemanakan beras-beras tersebut? Sementara saat ini hingga dua bulan mendatang Bulog harus menyerap beras dari petani. "Beras itu, komoditas yang tidak bisa tahan lama. Dalam umur tertentu pasti mutunya turun. Ketika tidak ada outlet penyaluran, potensi yang di Ogan Komering Ulu, itu, **beras di gudang rusak sangat besar**," tutur Khudori. (Paragraf 4 pada berita berjudul Momok di Balik Rencana Pemerintah Hapus Bantuan Beras Sejahtera)

- **Make moral judgment**

Tirto.id melalui teks beritanya memuat klaim-klaim moral, seperti :

- Kembalikan skema penyaluran subsidi pangan dalam bentuk pemberian subsidi berupa beras langsung kepada masyarakat pra sejahtera, bukan dalam bentuk subsidi uang,
- Stop impor dalam bidang pangan.
- Kendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat, dan

- Tercapainya swasembada pangan.

Tirto.id memperkuat *frame* ini dengan berulang kali menyebutkan tentang "swasembada pangan" dalam teks beritanya. Tirto.id berulang kali hendak berupaya mengembalikan ingatan khalayak pada masa keemasan pemerintahan Soeharto yang berhasil melakukan swasembada pangan. Meskipun Tirto.id sendiri menyebutkan bahwa swasembada pangan di masa pemerintahan Soeharto sebetulnya **rapuh** dan hanya **fatamorgana**.

Impor Jalan Terus Ketika Swasembada Indonesia pernah swasembada beras ketika dipimpin oleh Suharto, meski sebetulnya **rapuh** dan hanya **fatamorgana**. Itu terjadi pada 1984 dan diakui oleh badan PBB Food and Agriculture Organization (FAO) (Paragraf 3 dalam berita berjudul, *Apakah Saat Swasembada Tak Boleh Impor Pangan?*)

"Namun, ketahanan pangan di bawah pengelolaan Orde Baru ternyata **rapuh**. Swasembada yang dibanggakan itu, sebut Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra dalam *Kebijakan Pembangunan Agribisnis Padi* (2004), hanya bertahan lima tahun (hlm. 32)" (Paragraf 20 dalam berita berjudul *Swasembada Beras ala Soeharto: Rapuh dan Cuma Fatamorgana*).

Di masa pemerintahan Jokowi, swasembada pangan adalah bagian dari janji Jokowi untuk melanjutkan

keberhasilan swasembada pangan di era kepemimpinan Soeharto. Dan janji swasembada pangan belum terpenuhi hingga masa kepemimpinan Jokowi berakhir di pertengahan tahun 2019. Setidaknya janji tersebut baru bisa dipenuhi jika Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden RI pada periode kepemimpinan 2019-2024. Dengan kata lain, swasembada pangan di Indonesia akan tercapai jika Jokowi dipercaya kembali untuk memimpin Indonesia.

- ***Treatment recommendation***

Tirto.id menekankan penyelesaian masalah pada Pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam mengelola ketahanan pangan demi tercapainya visi swasembada pangan di negeri ini. Meskipun skor indeks ketahanan pangan global versi *Global Food Security Index* (GFSI) memperlihatkan adanya perbaikan ketahanan pangan Indonesia dari tahun ke tahun. Namun hal itu dianggap bukanlah suatu keberhasilan yang membanggakan jika Pemerintah Indonesia belum mencapai swasebada pangan dan menghentikan impor beras/jagung dari negara maju.

Deputi Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud berharap **ada perhatian serius** dari semua pihak untuk bersama-sama mengatasi tantangan ketahanan

pangan tersebut. "Logistik pergudangannya dan yang penting transportasinya," tukas Musdhalifah. (Paragraf terakhir pada berita berjudul, Masalah Logistik Disebut Masih Jadi Tantangan Ketahanan Pangan RI)

Indeks ketahanan pangan global *Global Food Security Index* (GFSI), hasil kerja sama The Economist dan perusahaan sains bidang pangan Corteva, menunjukkan ketahanan pangan Indonesia memang **ada perbaikan** setidaknya sejak 2012. Skor Indonesia di semua aspek pada 2012 sebesar 46,8 naik menjadi 54,8 pada 2018 (skor tertinggi 100). Tahun lalu, Indonesia menempati posisi 65 di dunia dan kelima di ASEAN dari 113 negara (Oktober 2018) (Paragraf 7 pada berita berjudul *Seberapa Kuat Ketahanan Pangan Indonesia?*)

Tirto.id dalam salah satu beritanya menawarkan penyelesaian masalah tentang pentingnya dilakukan pemetaan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pemerintah dan lembaga lain yang terkait dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran. Ini terkait data skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang menyebutkan mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Namun, ada 81 kabupaten (19,47 persen) dan 7 kota (7,14 persen) di Indonesia yang perlu mendapat prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif.

*Pemetaan ketahanan pangan di wilayah-wilayah Indonesia penting. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah tersebut, baik pemerintah atau lembaga lainnya dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran (Paragraf terakhir pada berita berjudul Seberapa Kuat Ketahanan Pangan Indonesia?)*

Tirto.id memperkuat *frame* penyelesaian masalah ini melalui pernyataan pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, yang mengatakan bahwa swasembada lebih dekat ke konsep kedaulatan dan kemandirian pangan. Sementara swasembada lebih merujuk ke surplus produksi, ketahanan pangan lebih kepada tersedianya pangan dengan harga terjangkau, terlepas dari mana sumbernya, tak peduli apa itu diproduksi di dalam negeri atau didatangkan dari luar.

*“Ketahanan pangan mengacu ke terpenuhinya kebutuhan pangan sampai level individu. Dia tidak bicara terpenuhinya dari impor atau produksi. Singapura tidak punya lahan padi, tetapi ketahanan pangannya tinggi,” kata Khudori (Paragraf 5 pada berita berjudul Seberapa Kuat Ketahanan Pangan Indonesia?).*

Sebagaimana untaian kalimat yang dua kali dikutip oleh Tirto.id :

*“Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara*

*keseluruhan,” kata Presiden RI ke-2 ini seperti dikutip dari buku Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto (2006) karya Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Adi Sage (hlm. 92).*

**Tabel 3 Frame Tirto.id tentang Strategi Ketahanan Pangan Indonesia**

<b>Define Problem</b> (Pendefinisian Masalah)	Tirto.id mendefinisikan isu ketahanan pangan dari <b>aspek ekonomi</b> semata, dengan menyebut jumlah produksi beras dan jagung, jumlah stok beras Bulog, jumlah impor jagung, fluktuasi harga bahan pangan dalam negeri hingga persentase tingkat ketahanan pangan. Aspek ekonomi ini diperkuat Tirto.id dengan penggunaan data berupa angka-angka.
<b>Diagnose Causes</b> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Tirto.id menganggap masalah yang timbul terkait ketahanan pangan disebabkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri yaitu dalam hal ini adalah pemerintahan Jokowi.
<b>Make Moral Judgement</b> (Membuat Pilihan Moral)	Tirto.id melalui teks beritanya memuat klaim-klaim moral, seperti : a. Kembalikan skema penyaluran subsidi pangan dalam bentuk pemberian subsidi berupa beras langsung kepada masyarakat pra sejahtera, bukan dalam bentuk subsidi uang, b. Stop impor dalam bidang pangan. c. Kendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat, dan d. Tercapainya swasembada pangan.

<b>Treatment Recommendation</b> (Penyelesaian Masalah)	Tirto.id menekankan penyelesaian masalah pada Pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam mengelola ketahanan pangan demi tercapainya visi swasembada pangan di negeri ini
---	---

## Kesimpulan

Tirto.id menganggap masalah yang timbul terkait ketahanan pangan disebabkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Penyebab utama bersumber dari rencana pemerintah yang mengubah skema penyaluran subsidi pangan ke masyarakat pra sejahtera melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sebelumnya subsidi dalam Program BPNT diberikan dalam bentuk beras dan bahan pangan lainnya. Namun pemerintah hendak mengubah subsidi dalam bentuk transferan uang. Tentu saja perubahan skema penyaluran dalam Program BPNT ini membuat Bulog kewalahan, karena menyebabkan penumpukan stok beras di gudang Bulog. Padahal beras merupakan bahan pangan yang cepat rusak dan harus segera disalurkan. Belum lagi Bulog masih harus membeli beras atau gabah petani dengan harga tinggi.

Tirto.id menggiring khalayaknya bahwa strategi ketahanan pangan di Indonesia tidak jelas. Di satu sisi pemerintah hendak mencapai

swasembada pangan sebagaimana yang pernah dicapai pada masa pemerintahan Soeharto. Meski Tirto.id menyebutkan bahwa swasembada pangan di era pemerintahan Soeharto sesungguhnya rapuh dan fatamorgana. Namun di sisi lain, pemerintah membuka kran impor beras dan jagung dari negara maju yang justru dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai kebijakan yang menyakiti petani. Anehnya, pemerintah beranggapan impor beras dan jagung tidak bertentangan dengan program swasembada pangan atau kemandirian pangan tapi kebijakan impor disebutkan untuk mengejar ketahanan pangan. Dan ini pun pernah dilakukan oleh pemerintahan Soeharto meski swasembada pangan tercapai.

Tirto.id cenderung menggunakan diksi yang berkonotasi negatif pada penulisan judul berita maupun isi berita. Penggunaan kata dan kalimat yang berkonotasi negatif ini seolah-olah menunjukkan bahwa Tirto.id tidak sepenuhnya setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terkait ketahanan pangan, seperti kebijakan pemberian subsidi berupa transferan uang pada masyarakat pra sejahtera serta dibukanya impor beras dan jagung dari negara maju dengan dalih untuk menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.



## Referensi

### Buku :

- Arifin, Bustanul, 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Bungin, Burhan. 2011. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Effendy Uchjana, O. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi : Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Hamad, Ibnu. 2014. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, ed. 1*. Jakarta: Granit.
- Iskandar, Sabil Dudi dan Lestari, Rini. 2016. *Mitos Jurnalisme*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- McQuail, Dennis and Sven Windahl. 1993. *Communication Models: For The Study of Mass Communication. 2 nd Edition*. New York: Longman Inc.
- Mulyana, Deddy., Solatun. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Kriyantono, R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup.
- Romli, M. Syamsul Asep. 2014. *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Salim, A. 2001. *Teori Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers

### Sumber lain

- Fernando Lumowa, *Media Online: Teknik Dasar Penulisan Berita, Arlikel dan Bahasa Jurnalislik*, [sulut.kemenag.go.id/file/file/humas/zuvw1339679719.ppsx](http://sulut.kemenag.go.id/file/file/humas/zuvw1339679719.ppsx) diakses pada 04 Mei 2017 pkl 09:04 WIB
- Pambudy, Ninuk Mardiana (2002). World Food Summit dan Ketahanan Pangan. Kompas, Sorotan, Senin, 17 Juni : 36.
- <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>
- <https://tirto.id/seberapa-kuat-ketahanan-pangan-indonesia-dhNr>, diunduh tanggal 26 maret
- <https://tirto.id/rastra-akan-jadi-bantuan-non-tunai-beras-bulog-terancam-rusak-dhRo>, diunduh tanggal 26 maret 2019, pukul 11:04
- [https://tirto.id/impor-jagung-30-ribu-ton-bukti-pemerintah-tak-serius-urus-pangan-ddP4?utm\\_source=Tirtoid&utm\\_medium=Terkait](https://tirto.id/impor-jagung-30-ribu-ton-bukti-pemerintah-tak-serius-urus-pangan-ddP4?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait), diunduh tanggal 26 maret 2019, pukul 11:14
- <https://tirto.id/apakah-saat-swasembada-tak-boleh-impor-pangan-dg61>, diunduh tanggal 26 maret 2019, pukul 11:30
- <https://tirto.id/masalah-logistik-disebut-masih-jadi-tantangan-ketahanan-pangan-ri-dg3D>, diunduh tanggal 26 maret 2019, pukul 11:30
- <https://tirto.id/momok-di-balik-rencana-pemerintah-hapus-bantuan-beras-sejahtera-dhXn>, diunduh tanggal 26 maret 2019, pukul 11:30
- <http://lifelitan.com/hasil-survey-orang-Indonesia-lebih-memilih-media-online-dibanding-media-cetak>, diakses tanggal 19 April 2017 pukul 10.40 WIB